

BAB V

KESIMPULAN

Partai Rakyat Demokratik pada esensinya merupakan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk tradisi penindasan terhadap masyarakat dalam bentuk apapun. PRD lahir sebagai bentuk respon kediktatoran pemerintah Orde Baru yang selama kurun waktu 30 tahun lebih berkuasa menghasilkan penindasan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Demokrasi yang sejatinya mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial telah dimanipulasi demi menjamin dan melanggengkan *status quo* Orde Baru.

Cikal bakal PRD merupakan berawal dari gerakan mahasiswa pasca ditertibkan aktivitas politiknya dalam kebijakan NKK/BKK. Terhitung hampir satu dasawarsa sejak pemberlakuannya merupakan perodesasi dari kevakuman dinamika gerakan mahasiswa. Hal tersebut karena Orde Baru memandang bahwa kampus merupakan salah satu arena perlawanan politik terhadap pemerintah. Dalam situasi itulah, sejumlah aktivis mahasiswa yang kritis pun menjadi sadar bahwa kampus tidak lagi memberi ruang yang cukup kondusif bagi pengembangan pemikiran kritis mereka.

Akhirnya sejak periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an, mulai tumbuh dan menjamur gerakan alternatif mahasiswa dalam bentuk kelompok-kelompok diskusi/studi dan pers mahasiswa sebagai bentuk baru aktivitas mahasiswa. Kelompok ini mandiri dari otoritas birokrasi kampus, bergerak di luar kampus, dan mulai menyadari bahwa gerakan mahasiswa sejatinya harus bersatu dengan rakyat.

Tahapan yang sedang digeluti oleh aktivis gerakan mahasiswa pada era ini merupakan suatu pergulatan aktivitas yang panjang dan disertai berbagai bentuk pertentangan antara sesama aktivisnya. Gerakan mahasiswa periode 1990-an adalah tahapan dimana para mahasiswa sudah bertekad untuk tidak hanya berbicara kritis tentang rakyat, melainkan lebih jauh lagi bersama-sama berjuang dengan rakyat. Di saat Orde Baru masih dalam kuat dan represif, para aktivis tersebut secara konsisten dan militan menunjukkan perlawanan secara terbuka terhadap Orde Baru.

Seiring dinamika gerakan mahasiswa pada periode 1990-an tersebut, sebagian dari para aktivis ini mulai membangun basis-basis komunitas di kalangan masyarakat di luar mahasiswa yang diantaranya dalam komunitas-komunitas kaum tani, buruh pabrik, maupun kaum miskin kota. Para aktivis ini secara tekun berdiskusi dalam rangka mengembalikan kembali kesadaran politik rakyat. Pada akhirnya kerja-kerja politik aktivis mahasiswa tersebut membuahkan hasil. berbagai komite-komite aksi dan advokasi bermunculan di daerah pedesaan atau kabupaten yang dipimpin sendiri oleh rakyat.

Dinamisasi komite-komite aksi yang muncul dan berkembang akhirnya mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Komite-komite aksi tersebut diberi nama sesuai dengan isu politik yang diangkat. Hal ini menjadikan fenomena gerakan mahasiswa 90-an mempunyai karakteristik lain, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan merupakan aliansi dengan elemen-elemen masyarakat seperti buruh, tani, kaum miskin kota dan elemen lainnya.

Berbagai macam bentuk advokasi yang dilakukan mahasiswa untuk rakyat, dianggap oleh para aktivis sebagai awal dari gerakan kultur yang ditransformasikan kepada rakyat. Tolak ukur pendekatan kultural yang dilakukan mahasiswa dilihat dari sudah tumbuhnya keberanian kaum buruh, tani, dan miskin kota untuk turun ke jalan tanpa harus disertai oleh mahasiswa.

Dalam paradigma ini, kaum buruh, tani, dan miskin kota bukan lagi kekuatan tunggal, melainkan secara pasti bahwa semua lapisan masyarakat harus diorganisir sebagai kekuatan perubahan. Berangkat dari perkembangan itulah yang kemudian melahirkan suatu wadah payung organisasi perjuangan yang merupakan hasil dari kerja-kerja politik mahasiswa-rakyat yang dikenal dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Cikal bakal PRD berawal dari organisasi mahasiswa ekstra kampus yang bernama Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Strategi dan format gerakan SMID yaitu dengan cara mengorganisir dan memobilisasi elemen-elemen rakyat yang diantaranya; Serikat Tani Nasional (STN) dari kalangan petani, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) dari kalangan buruh, Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) dari kalangan seniman dan budayawan, Sarekat Rakyat Indonesia (SRI) dari kalangan rakyat miskin, dan Solidaritas Perjuangan Rakyat Maubere (SPRIM) sebagai basis perjuangan referendum Timor-Timur. SMID dan organ-organ tersebut bersinergi dan membentuk wadah payung perjuangan bersama yang bernama

Persatuan Rakyat Demokratik dan kemudian mentransformasikan wadahnya menjadi sebuah partai politik, yaitu Partai Rakyat Demokratik.

Sejak awal pendeklarasiannya, PRD secara konsisten dan militan berusaha membongkar semua bentuk dan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara Orde Baru yang cenderung represif dan militeristik. Dengan jargon-jargon yang progresif dan revolusioner seperti; “Cabut Dwifungsi ABRI”, “Turunkan Harga”, “Cabut Paket 5 UU Politik”, dan “Naikkan Upah Buruh 100 persen”.

PRD dalam perjuangannya mendesak ditegakkannya demokrasi, supremasi sipil, dan redistribusi kekayaan Negara untuk rakyat miskin. PRD dalam eksistensinya telah keluar dari kampus, menjadi organisasi politik dan kemudian menjadi Partai Politik. PRD muncul bukan sebagai gerakan moral layaknya gerakan mahasiswa era 1970-an yang cenderung bersifat eksklusif, reaktif, dan belum memiliki ideologi pergerakan.

Gerakan PRD sudah memiliki pola dan paradigma baru bagi wacana gerakan mahasiswa karena gerakannya sudah melibatkan rakyat sebagai partner berjuang bersama, dan lebih memilih pada aksi-aksi politik militan. PRD lebih menuntut perubahan struktur masyarakat seutuhnya dan bukan hanya sekedar kritik-kritik menuntut perubahan pemerintahan.

Dalam perkembangannya banyak catatan kelam yang harus diterima oleh PRD sebagai konsekuensi dan proses pendewasaan perjuangan politiknya. Sebagai contoh ketika peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Megawati di Jalan Diponegoro Jakarta pada tahun 1996, yang dikenal dengan

Kerusuhan 27 Juli 1996. Oleh pemerintah, PRD dianggap sebagai dalang dan pelaku utama peristiwa tersebut. Selanjutnya perburuan, penculikan, penangkapan hingga pemenjaraan menjadi babak baru perjuangan PRD. Regim Orde Baru Melalui pasukan elite Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar, menculik dan menyiksa para aktivis PRD. Sebagian aktivis ini bisa kembali dengan selamat, sementara sebagian aktivis lainnya hilang, dan hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Tak cukup sampai disitu, pemerintah Orde Baru juga melakukan propaganda dan stigmatisasi terhadap organ PRD sebagai sebuah sosok yang dianggap menyerupai Partai Komunis Indonesia (PKI) atau PRD Kiri serta berpaham Komunis. Hal tersebut yang mengakibatkan banyak cercaan masyarakat terhadap baik organ PRD maupun kepada para aktivisnya.

Walaupun dalam situasi yang sebagian aktivisnya berada di penjara dan masih dalam intimidasi negara serta masyarakat, ternyata hal tersebut tidak serta merta membuat perjuangan PRD berhenti. Koordinasi dan konsolidasi pun tetap digalakan oleh para aktivisnya yang berada di luar balik jeruji. Terbukti sepanjang akhir 1997 hingga awal 1998 banyak organ-organ hasil bentukan para aktivis PRD. Organ-organ tersebut memiliki warna dan karakteristik yang cukup kental dengan pola perjuangan PRD.

Pada Mei 1998 Presiden Soeharto berhasil ditumbangkan oleh gerakan massa yang dipelopori mahasiswa. Tumbangny seorang Jenderal Soeharto diyakini mampu membuka ruang politik yang selama 32 tahun ditutup rapat. Bagi PRD momentum tersebut dianggap hal yang penting untuk

memanfaatkan keterbukaan politik setelah tumbangya Presiden Soeharto, yakni dengan memunculkan PRD secara terbuka di depan rakyat dan kekuasaan Orde Baru yang masih bertahan. PRD memandang sudah saatnya melanjutkan perjuangan melalui parlementer yaitu pada momentum Pemilu 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi. Konsolidasi pun digalakan dalam rangka memperjuangkan PRD agar lolos verifikasi pemilu 1999, walau diterpa cercaan masyarakat sebagai akibat stigma Orde Baru yang masih melekat pada PRD.

Dalam perkembangannya, PRD pun akhirnya lolos sebagai partai politik peserta pemilu 1999 dengan nomor urut 16. Pada pemilu 1999 tersebut, PRD hanya mendapat 78.000 suara. Jumlah yang cukup signifikan karena anggota PRD sendiri pada tahun 1999 paling banyak mencapai angka 1.000 orang. Pasca pemilu, kuantitas anggota PRD mengalami penurunan hingga menyisakan kurang lebih 500 orang. Anggota-anggota PRD tersebut tersebar di dalam 15 KPW (Komite Pimpinan Wilayah), 152 KPK (komite Pimpinan Kota) di seluruh Indonesia.

Meski berjuang dalam ranah intra parlementer, bagi PRD bahwa tekanan gerakan massa dalam bentuk ekstra parlementer di jalanan akan lebih ampuh dalam membuka ruang demokrasi yang lebih luas lagi. PRD menyepakati untuk tetap akan berjuang melalui aliansi aksi-aksi massa untuk memboikot legislatif dan eksekutif yang tidak sanggup dan tidak mampu menjalankan tuntutan reformasi total.